

## ANALISA PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA KEUANGAN PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Oleh :

Vincentia Devina Setyawati<sup>1)</sup>, Nia Yuniarsih<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Darma Cendika

<sup>1</sup>email: vincentia.devina@ukdc.ac.id

<sup>2</sup>email: nia.yuniarsih@ukdc.ac.id

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel :

Submit, 23 Agustus 2024

Revisi, 31 Agustus 2024

Diterima, 8 September 2024

Publish, 15 September 2024

#### Kata Kunci :

Lembaga Swadaya Masyarakat,  
Prinsip Tata Kelola,  
Keuangan.

### ABSTRAK

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia berkembang pesat pascareformasi. Perkembangan tersebut didorong oleh terbukanya kebebasan berorganisasi. LSM di Indonesia kemudian berkembang di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Konteks penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip tata kelola akuntansi pada pengelolaan keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan berdasarkan wawancara terstruktur dan observasi pada LSM Relawan Kembang Joyo. Dari hasil wawancara yang dihasilkan dilakukan analisis mengenai Tata Kelola Keuangan maka disimpulkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat telah melakukan prinsip-prinsip Tata Kelola Keuangan antara lain: Prinsip Transparansi (*Transparency*), Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*), Prinsip Tanggungjawab (*Responsibility*), Prinsip Kemandirian (*Independency*), dan Prinsip Keadilan (*Fairness*). Semua prinsip tersebut diterapkan dengan harapan Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut dapat menjalankan visi dan tujuan dari organisasi tersebut dan juga dapat melaksanakan seluruh kegiatannya dengan berkesimbangan. Adapun prinsip lain dari prinsip utama dari sebuah tata kelola keuangan yang dimaksud dari penelitian ini yaitu kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dan donatur, tetapi hal tersebut perlu kembali melihat prinsip-prinsip sebelumnya, bahwa prinsip-prinsip tersebut juga dapat mendukung dalam Prinsip Kepercayaan (*Trust*) tersebut.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license*



### Corresponding Author:

Nama: Vincentia Devina Setyawati

Afiliasi: Universitas Katolik Darma Cendika

Email: vincentia.devina@ukdc.ac.id

### 1. PENDAHULUAN

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia berkembang pesat pascareformasi. Perkembangan tersebut didorong oleh terbukanya kebebasan berorganisasi. LSM di Indonesia kemudian berkembang di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan kuantitas LSM pascareformasi didorong oleh beberapa faktor. Pertama, peningkatan kemiskinan di kota maupun desa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan penyesuaian struktural yang berdampak pada penghapusan subsidi. Kedua, meningkatnya konflik

sosial pascareformasi akibat proses transisi menuju demokrasi. Sebagian besar LSM yang berkembang pascareformasi bergerak sebagai respon terhadap kedua faktor tersebut.

Survei PIRAC pada tahun 2000 menunjukkan minimnya kepercayaan terhadap LSM dalam hal keuangan. Survei terhadap 2500 responden di 11 kota besar tersebut menanyakan alasan responden menolak mendukung atau menyumbang kegiatan LSM? Responden yang berpenghasilan Rp. 1,5 juta ke atas dan berpenghasilan Rp. 750 ribu – Rp. 1,5 juta menyatakan bahwa mereka menolak

menyumbang karena tidak percaya dengan individu-individu dalam LSM (43% dan 34%) serta tidak percaya pada organisasinya (14% dan 11%). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap LSM dalam hal pendanaan terkait erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LSM. Namun justru faktor kepercayaan itulah yang minim dimiliki oleh masyarakat terhadap LSM. Ketidakpercayaan tersebut didorong oleh faktor personal pengelola LSM tersebut maupun kelembagaan LSM tersebut yang tidak mampu membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat menganggap LSM memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi yang rendah sehingga LSM tidak memperoleh legitimasi sosial di masyarakat.

Namun kita lihat beberapa LSM yang cukup dikenal di masyarakat antara lain Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Urban Poor Consortium (UPC), Indonesian Corruption Watch (ICW) dan lain-lain. LSM-LSM yang besar tersebut disokong dengan pendanaan yang mumpuni pula. Sebagian besar LSM dengan kekuatan finansial yang memadai tersebut didukung oleh lembaga-lembaga donor baik dalam negeri maupun luar negeri. Persyaratan pendanaan yang ketat dari lembaga donor mendorong LSM-LSM tersebut untuk membentuk tata kelola yang profesional sebagai bentuk akuntabilitas organisasinya. Fakta ini menunjukkan bahwa tata kelola organisasi LSM sangat menentukan dalam meraih kepercayaan masyarakat maupun lembaga donor dalam hal akuntabilitas keuangan.

Untoro (2010) mengungkapkan bahwa terdapat tiga dimensi yang dapat menilai suatu organisasi, yaitu dimensi lingkungan dimana terdapat faktor eksternal dalam organisasi, dimensi transaksional yang adalah hubungan organisasi dengan lingkungan, dan dimensi organisasional yang merupakan proses dalam organisasi. Salah satu kunci untuk memperoleh kepercayaan karena akuntabilitas keuangan adalah adanya pelaporan keuangan yang baik dan sesuai standar. Hal tersebut menjadi kendala bagi LSM kecil karena minimnya sumber daya yang memahami laporan keuangan bagi organisasi nirlaba. Sektiono & Nugraheni (2017) mengatakan bahwa tata kelola yang baik dianggap paling mudah dalam lingkungan pemerintahan dan korporasi. Namun saat ini organisasi nirlaba juga diharuskan untuk menjadi organisasi yang kompeten dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip tata kelola keuangannya.

Beberapa penelitian terdahulu hanya meneliti prinsip transparansi dan akuntabilitas, seperti penelitian Widyasari et al. (2021), dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa banyak anggota komunitas yang belum memahami transparansi keuangan dengan penyusunan anggaran. Penelitian dari Arofah & Rahmawati (2017), Hermanto et al. (2021), dan Sari et al. (2018) menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik walaupun hanya

dilakukan secara sederhana dalam hal pencatatan laporan keuangannya.

Dalam aspek lain terkait akuntabilitas, LSM kecil dengan kegiatan terbatas dan sumber daya terbatas, akhirnya harus mengeluarkan biaya besar untuk mengaudit laporan keuangan. LSM yang bergantung pada lembaga donor tidak memperoleh pendanaan dari lembaga donor untuk melakukan audit. Padahal lembaga donor di sisi lain juga menuntut transparansi keuangan atas dana yang telah diberikan.

Oleh karena itu, sebagai organisasi nirlaba, LSM harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang laporan keuangan bagi organisasi nirlaba. Laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35. Namun LSM kecil tentunya mempunyai kesulitan pula untuk memiliki sumber daya yang telah memiliki pemahaman terhadap standar tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran pada suatu permasalahan yang terjadi secara lengkap dan bermakna. Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang relawan yaitu Relawan Kembang Joyo Pati. Lembaga Swadaya Masyarakat ini berlokasi di Kota Pati, Jawa Tengah.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur kepada pengurus dan observasi dokumen yang dimiliki oleh LSM tersebut. Pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan yang diperlukan dalam pengolahan laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa kajian yang terkait dengan objek penelitian yaitu mengenai pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelola LSM ini dan menganalisis penerapan prinsip tata kelola keuangannya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan pada LSM Relawan Kembang Joyo didapatkan data pendukung mengenai pengelolaan keuangan LSM antara lain akun yang digunakan sebagai alat pencatatan transaksi keuangan baik pendapatan maupun pengeluaran. Kemudian mengenai pembahasan tata kelola keuangan didapatkan dari hasil wawancara bersama salah satu anggota LSM Relawan Kembang Joyo.

#### Pendapatan dan Pengeluaran Kelolaan LSM

Relawan Kembang Joyo Pati memiliki buku pencatatan sebagai bukti transaksi, bukti transaksi tersebut disusun oleh sekretaris dan bendahara yang ada di Yayasan tersebut. Pengurus berwajib melaporkan jumlah transaksi kepada ketua LSM dan kemudian bendahara melakukan pencatatan harian yang dicatat dalam buku kas.

Adapun pendapatan yang diterima oleh Relawan Kembang Joyo Pati yaitu:

Tabel 1. Pendapatan Dana

Nama Akun	Keterangan
Sumbangan Tetap	Sumbangan ini didapatkan dari iuran yang diberikan oleh anggota LSM setiap bulannya.
Sumbangan Tidak Tetap	Sumbangan ini didapatkan dari pihak ketiga atau donatur. Banyak diterima ketika ada bencana.

Sumber: Data Olahan Peneliti

Bukan hanya pemasukan, LSM Relawan Kembang Joyo Pati juga memiliki alat untuk pencatatan transaksi pengeluaran yang dikelola yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Pengeluaran Dana

Nama Akun	Keterangan
Biaya Listrik dan Air	Pengeluaran yang rutin dikeluarkan perbulan untuk membiaya kebutuhan listrik dan air.
Biaya Bahan Bakar	Pengeluaran ini terjadi jika memerlukan kendaraan untuk menunjang kegiatan.
Biaya Perawatan Kendaraan	Pengeluaran ini terjadi jika kendaraan mengalami kerusakan ataupun dalam hal pemeliharaan rutin, seperti ganti oli, tambal ban.
Biaya Bantuan Sosial	Pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan bantuan, seperti bantuan korban bencana, pembelian paket sembako, serta pengiriman air bersih

Sumber: Data Olahan Peneliti

#### Prinsip Tata Kelola Keuangan LSM

Prinsip Tata Kelola Keuangan LSM Relawan Kembang Joyo Pati yang akan dibahas oleh peneliti ada 5 prinsip antara lain:

##### A. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Tata kelola keuangan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat sangat diperlukan transparansi dalam pelaporan keuangannya agar dapat dipercaya oleh masyarakat luas, terutama para donator yang memberikan donasinya untuk membiayai kebutuhan Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut. Prinsip transparansi ini dilakukan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan instansi, instansi harus menyediakan informasi yang material secara keuangan dan relevan dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan visi dari Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Instansi yang menaungi Lembaga Swadaya Masyarakat juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan laporan yang transparansi tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan dan pemangku kepentingan lainnya.

##### B. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Pada prinsip akuntabilitas ini diharapkan instansi yang menaungi Lembaga Swadaya Masyarakat harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Karena prinsip akuntabilitas ini akan bersandar pada kekuatan sistem pengendalian internal dan kinerja pengelolaan keuangan organisasi, yang harus dikembangkan secara spesifik sesuai dengan karakteristik Lembaga Swadaya Masyarakat. Penaksiran resiko dan penentuan aktivitas pengendalian akan menjadi kunci utama bagi pengembangan sebuah sistem pengendalian internal.

Akuntabilitas keuangan dari Lembaga Swadaya Masyarakat juga akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung kinerja pengelolaan yang lain, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, dan perangkat pengelolaan keuangan. Sehingga keseluruhan elemen akuntabilitas keuangan organisasi nirlaba tersebut harus dipahami dan dikembangkan secara sistematis, sebagai salah satu upaya mempertahankan keberlanjutan organisasi dan, pada akhirnya, sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi dan peran masyarakat sipil di Indonesia, untuk itu instansi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan instansi. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

##### C. Prinsip Tanggungjawab (*Responsibility*)

Salah satu fungsi organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat juga berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing.

Adanya penjelasan mengenai fungsi organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut maka perlu adanya kewajiban Lembaga Swadaya Masyarakat harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan sumber pemasukan dan pengeluaran yang jelas dan senantiasa ikut serta dalam menghayati, mengamalkan dan mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar, juga mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka

panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Governance*.

#### D. Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah memberdayakan masyarakat dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai visi dan tujuan dari masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut. Salah satu tujuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu untuk kepentingan masyarakat umum bukan hanya untuk kepentingan beberapa golongan saja. Prinsip ini dalam instansi Lembaga Swadaya Masyarakat ini yang dimaksud yaitu harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain diluar LSM.

Adanya hal tersebut maka sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat diharapkan dapat melakukannya, untuk membantu mengembangkan kemandirian dalam kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi secara partisipatif. Identifikasi yang telah dilakukan ini bertujuan agar mereka dapat merancang sendiri pendekatan yang tepat sebagai jalan keluarnya sehingga tidak ada intervensi dari pihak lain.

#### E. Prinsip Keadilan (*Fairness*)

Berbagai macam organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu bidang keagamaan, politik, kesejahteraan masyarakat, maupun yang berhubungan dalam penanganan alam. Dalam prinsip keadilan ini Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengambil dari pengamalan sila ke lima dalam Pancasila, dimana disebutkan "Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal tersebut dapat mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyong, organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat hidup di lingkungan yang masih berada di wilayah Indonesia. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai mahluk sosial sebaiknya memiliki sikap tolong menolong antar sesama, gotong-royong, tenggang rasa sesama manusia tanpa membedakan ras, suku, jenis kelamin dan agama selaras dengan tujuan dari sebuah organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat.

Prinsip Keadilan ini juga merupakan juga pendukung dalam memberikan hak sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat seperti menunjang dan mempertahankan nama baiknya saat menyelenggarakan program kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat dan para anggotanya. Lembaga swadaya masyarakat juga berhak untuk melakukan hal atas hak-hak yang telah dimilikinya dan mempertahankan hak keberlanjutan Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut sesuai dengan tujuan dan visa yang telah ditetapkan dari organisasi tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu: Lembaga Swadaya Masyarakat telah melakukan prinsip-prinsip Tata Kelola Keuangan antara lain: Prinsip Transparansi (*Transparency*), Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*), Prinsip Tanggungjawab (*Responsibility*), Prinsip Kemandirian (*Independency*), dan Prinsip Keadilan (*Fairness*). Semua prinsip tersebut diterapkan walaupun minim ilmu mengenai hal tersebut, sehingga harapan Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut dapat menjalankan visi dan tujuan dari organisasi ini dan juga dapat melaksanakan seluruh kegiatannya dengan berkesinambungan. Adapun prinsip lain dari prinsip utama dari sebuah tata kelola keuangan yang dimaksud dari penelitian ini yaitu kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dan donatur, tetapi hal tersebut perlu kembali melihat prinsip-prinsip sebelumnya, bahwa prinsip-prinsip tersebut juga dapat mendukung dalam Prinsip Kepercayaan (*Trust*) tersebut.

#### 5. REFERENSI

- Ardhian, David. 2016. Dinamika Peran dan Strategi LSM dalam Arena Politik Lingkungan Hidup: Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan. Diss. Bogor Agricultural University (IPB).
- Arofah, A. A., & Rahmawati, F. (2017). Tata Kelola Keuangan Pada Sekolah Menengah Kejuruan (Studi pada SMK Bina Mandiri Surakarta)
- Bastian, I. 2007. Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik. Jakarta: Erlangga
- Bungin, B. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dewi, Syanti. Pengembangan Sistem Dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan Serta Anggaran Organisasi Nirlaba. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia.
- Mahsun et.al., 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan. PSAK. Cetakan Keempat, Buku Satu, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2011. Standar Profesional Akuntan Publik, Jakarta: Salemba Empat.
- Ramadhan, Achmad Zuhri, and Diah Hari Suryaningrum. 2020. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba. Public Management and Accounting Review.
- Randa, F., 2012. Akuntabilitas Organisasi Gereja Pemaknaan dan Rekonstruksi Inkulturatif Nilai-Nilai Budaya Lokal. Disertasi. Malang:

- Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tarigan, Sally Marcelina Br. 2017. *Penataan Sistem Informasi Akuntansi dan Tata Kelola Lembaga Nirlaba di Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi*. Diss. Unika Soegijapranata Semarang.
- Trisnawati, Oktaria. 2015. *Aktualisasi Tata Kelola (Good Governance) LSM Pattiro (Kajian Dalam Isu Pencegahan Korupsi Di Kota Semarang)*. Diss. Universitas Negeri Semarang.
- Widyasari, Syanti, & Nataherwin. 2021. *Pengembangan Sistem Dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan Serta Anggaran Organisasi Nirlaba*. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*.